



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 784/VIII/2013

III/AGUSTUS 2013



DPR Harapkan Jenderal Moeldoko Tuntaskan Reformasi TNI



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA AGUSTUS 2013

Minggu ketiga bulan Agustus, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus dengan dua agenda yaitu Pidato Pembukaan Masa Persidangan I tahun 2013-2014 dan Pidato Presiden atas Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (RAPBN) tahun 2014 beserta Nota Keuangannya, dan kegiatan Rapat Paripurna 20 Agustus 2013. Berikut rangkumannya:

Rapat Paripurna 16 Agustus

Rapat Paripurna 16 Agustus 2013, pada pidato Pembukaan Masa Persidangan I, ditekankan oleh Ketua DPR perlunya optimalisasi tiga fungsi DPR pada masa sidang ini kendati pada tahun ini adalah tahun politik. Kegiatan di bidang anggaran, diminta dilaksanakan secara efektif karena RAPBN 2014 harus diselesaikan pada akhir bulan oktober 2013 sebagaimana perintah UU. Selanjutnya disampaikan bahwa RAPBN yang akan dibahas merupakan instrumen yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, yang diarahkan bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional serta menentukan arah dan prioritas pembangunan. Sebagai instrumen, APBN bukan merupakan hasil akhir, tetapi sebuah proses yang dalam realisasinya perlu terus mendapat perhatian dan pengawasan dari para wakil rakyat, untuk memastikan bahwa APBN telah dialokasikan tepat guna, dan tidak menyimpang, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam kegiatan legislasi, dijelaskan bahwa DPR akan menyelesaikan 35 RUU yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, baik di Komisi, Baleg maupun Panitia Khusus. Untuk penyelesaian RUU-RUU yang masuk Prioritas tahun 2013 ini, Ketua DPR meminta komitmen kuat, baik dari kalangan DPR maupun Pemerintah, karena Prolegnas yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan bersama antara

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



DPR dan Pemerintah.

Di bidang pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR akan melanjutkan tugas Tim-Tim pengawas yang telah dibentuk, meminta Komisi-Komisi berikut berbagai panja di Komisi untuk melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, untuk membahas permasalahan yang berkembang sekaligus mencari solusi bagi penyelesaiannya.

Dalam pidato disinggung juga mengenai masalah kesiapan KPU dalam persiapan Pemilu 2014, permasalahan buruh, masalah TKI di Luar Negeri, masalah Lembaga Masyarakat, penegakan hukum dan sebagainya.

Adapun Pidato Presiden dalam mengantar RAPBN 2014 dikatakan, bahwa Nota Keuangan dan RAPBN 2014 merupakan momentum terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2010-2014. Oleh karenanya, berbagai rencana strategis dan kebijakan umum dalam RAPBN tahun 2014, secara tidak langsung akan mencerminkan kelanjutan dari hasil pembangunan nasional dalam empat tahun terakhir. Presiden juga bertekad untuk melanjutkan agenda reformasi beserta segenap komponen bangsa. Hasilnya, dalam sembilan tahun terakhir, walaupun dibawah tekanan berbagai persoalan baik yang terjadi diluar kuasa kita, seperti gejolak ekonomi dan bencana alam maupun daam permasalahan internal seperti konsolidasi demokrasi, pertumbuhan ekonomi periode 2004-2009 mencapai rata-rata 5,5%. Capaian yang patut disyukuri, jika dibandingkan



dengan pertumbuhan ekonomi negara besar dan negara maju, pada kurun waktu yang sama.

Presiden juga mengatakan, *alhamdulillah* dalam empat tahun terakhir ini telah banyak hasil pembangunan yang dinikmati rakyat Indonesia. Sebagai contoh, periode 2009-(Juni) 2013, Indonesia berhasil memacu pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,0% pertahun, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi lima tahun sebelumnya. Inilah pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi 15 tahun lalu.

Rapat Paripurna 20 Agustus

Rapat Paripurna tanggal 20 Agustus mengagendakan empat agenda acara yaitu: [1] Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2014, [2] Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, [3] Laporan Pimpinan Baleg tentang usulan perubahan Prolegnas RUU tahun 2013, dan [4] penetapan dan susunan keanggotaan Fraksi-Fraksi dalam Alat Kelengkapan DPR-RI.

Untuk *agenda pertama*, pandangan umum fraksi atas RUU APBN 2014, akan disampaikan pada buletin berikutnya.

Untuk *agenda kedua*, Menteri Keuangan mewakili Pemerintah memberi jawaban atas pandangan fraksi-fraksi tentang RUU Pertanggungjawaban RAPBN 2012 yang intinya sebagai berikut. [1] Pemerintah sepakat dengan pandangan seluruh fraksi DPR-RI agar Pemerintah mengoptimalkan peran APBN sebagai stimulus ekonomi dan optimalisasi potensi pasar domestik, sebagai pendorong pertumbuhan, dan perlunya upaya penyebaran pusat pertumbuhan, serta memfokuskan pengeluaran anggaran untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. [2] Pemerintah sepakat untuk meningkatkan tertib dan disiplin anggaran, mulai tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengendalian dan penyusunan pertanggungjawaban sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. [3] Pemerintah sepakat bahwa angka-angka asumsi dasar ekonomi makro harus disusun secara realistis. Pemerintah berusaha mengajukan angka-angka dasar ekonomi makro serealistik mungkin, dengan meningkatkan akurasi perhitungan asumsi dasar ekonomi makro melalui penyempurnaan dan pengembangan metode perhitungan. [4] Tentang perlunya penyusunan asumsi makro yang berdimensi jangka panjang, Pemerintah mengatakan bahwa, telah mengajukan gambaran perkembangan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah pada saat penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. Selain itu, Pemerintah telah melakukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJMN.

[5] Adapun mengenai arah kebijakan fiskal Pemerintah, sebagaimana yang dipertanyakan oleh Fraksi-Fraksi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja, telah ditempuh melalui tiga fungsi utama yaitu: *fungsi alokasi* yang diarahkan untuk mendukung

terciptanya efisiensi dan efektifitas perekonomian melalui dukungan pembangunan infrastruktur; *fungsi distribusi* diarahkan untuk mendorong terwujudnya keadilan dan pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan; dan *fungsi stabilisasi* yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan fundamental perekonomian, antara lain pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas strategis. Untuk itu, Pemerintah telah melaksanakan kerjasama dengan BI membentuk forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sehingga terjadi sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, baik nasional dan daerah.

[6] atas pandangan Fraksi-Fraksi berkaitan dengan *lifting* minyak, Pemerintah dalam menetapkan *tunggu lifting* minyak dalam APBN-P 2012 sebesar 930.000 barel/hari telah mempertimbangkan: potensi kemampuan produksi masing-masing lapangan Migas KKKs; penurunan produksi alamiah sumur; temuan cadangan Migas baru; dan perkiraan optimalisasi produksi minyak di lapangan Cepu. Untuk mencapai target *lifting* sebesar 930.000 barel/hari, Pemerintah melakukan upaya maksimal, antara lain meningkatkan kehandalan peralatan produksi; meningkatkan efisiensi operasi dan optimalisasi fasilitas produksi; meningkatkan upaya optimalisasi lapangan produksi dan pengembangan lapangan; dan meningkatkan koordinasi untuk penyelesaian masalah yang terkait dengan regulasi, perijinan dan tumpang tindih lahan. Namun demikian, realisasi *lifting* minyak hanya tercapai pada besaran 860.000 barel/hari terutama disebabkan oleh *unplanned shutdown*, yang pemicunya antara lain karena kerusakan sarana produksi.

[7] akan halnya permintaan dari Fraksi-Fraksi berkaitan dengan usulan agar konsumsi modal Pemerintah mampu menjadi stimulus pertumbuhan untuk memprioritaskan belanja modal yang efisien, Pemerintah menjawab bahwa akan menerapkan *flat policy* pada belanja pemerintah yang bersifat konsumtif dan meningkatkan belanja yang bersifat produktif, seperti belanja modal, demi menunjang pembangunan perekonomian nasional.

[8] untuk menghindari penumpukan belanja di akhir tahun, dalam hal realisasi pencairan dana, Pemerintah menjelaskan bahwa telah mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan tingkat realisasi penyerapan anggaran pada K/L dan menghindari penumpukan belanja di akhir tahun, melalui pendekatan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran dan mengurangi jalur birokrasi.

Agenda ketiga Rapat Paripurna 20 Agustus, mengenai Laporan Baleg tentang penambahan RUU Prolegnas 2013, telah disetujui 5 RUU yaitu: RUU tentang RRI, RUU tentang Hukum Disiplin Militer, RUU tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, RUU tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan RUU tentang Hak Cipta.

Agenda keempat, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan susunan dan keanggotaan Fraksi-Fraksi dalam AKD DPR-RI yaitu pada Komisi-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, BURT, BKSAP, BAKN, dan Badan Kehormatan. Susunan



kenaggotaan ini telah mendapat penetapan pada Rapat Paripurna DPR-RI.

Diplomasi Parlemen

Dalam rangka dukungan DPR kepada pemerintah, ketua DPR menyampaikan dalam Pidato Pembukaan Sidang bahwa Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan berbagai inisiatif baru, menghadapi lambatnya pertumbuhan ekonomi global, terutama yang menimpa negara-negara maju, dan diperkirakan masih akan berlangsung lama.

Oleh karena itu, DPR berharap agar Pemerintah dapat melakukan persiapan yang baik menghadapi Konferensi Tingkat Tinggi G-20 yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September mendatang di Rusia. Di samping itu, Indonesia akan kembali memimpin APEC untuk kurun waktu 2013-2014, dan menjadi tuan rumah APEC di Bali pada bulan November mendatang. Ditengah melemahnya ekonomi dunia, APEC dituntut mampu membangun ketahanan ekonomi regional melalui berbagai program-program kongkret, yang dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi regional Asia Pasifik. DPR berharap selama masa kepemimpinan Indonesia, kita dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. DPR juga meminta Pemerintah agar memanfaatkan kesempatan itu untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Dalam upaya mengembangkan diplomasi parlemen, pada pertengahan September mendatang, DPR juga akan mengirimkan delegasi ke Sidang Umum AIPA ke-34 di Brunei Da-

russalam yang mengambil tema *The Role of AIPA in Realising ASEAN Community*. DPR akan mengirimkan delegasi, dengan kesiapan penuh, duduk di berbagai komisi yang dibentuk.

Selain itu, DPR-RI sebagai Presiden SEAPAC (*South East Asian Parliamentarians Against Corruption*), akan menjadi tuan rumah Sidang Umum SEAPAC pada akhir bulan Oktober 2013 di Medan, dengan tema: *Corrupt-free Shoutheast Asia: Common Goal, Common Action*. SEAPAC merupakan sebuah *regional chapter* dari GOPAC (*Global Organization of Parliamentarians Against Corruption*) yang bertujuan untuk menguatkan kerjasama antar parlemen di Asia Tenggara dalam memerangi tindak pidana korupsi. Ketua DPR terpilih menjadi Presiden SEAPAC Periode 2013-2014 di Manila, sementara Ketua *National Chapter* GOPAC Indonesia dipercayakan kepada Wakil Ketua DPR-RI koordinator bidang Industri dan Pembangunan.

Dewan turut memantau perkembangan situasi politik di Mesir yang akhir-akhir ini semakin menjadi perhatian dunia, mengingat Mesir adalah negara yang mempunyai peran dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia yang diprakarsai oleh para ulama Mesir. Instabilitas politik yang disertai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi, telah mengakibatkan ratusan korban jiwa, sungguh memprihatinkan dan tidak sesuai dengan hukum internasional. DPR meminta Pemerintah untuk senantiasa mencermati kondisi politik di Mesir dan ikut berperan dalam upaya menciptakan kembali perdamaian di negara tersebut.**

DPR Harapkan Jenderal Moeldoko Tuntaskan Reformasi TNI

Proses uji kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki urgensi dan arti yang penting. Pergantian calon Panglima merupakan bagian dari rangkaian proses penyempurnaan penuntasan agenda reformasi TNI yang sudah berjalan sejak tahun 1999.

“Pergantian Panglima untuk menuntaskan menyempurnakan agenda reformasi TNI,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, saat memimpin *fit and proper test* Jenderal TNI Moeldoko sebagai Calon Panglima TNI, Rabu (21/8).

Komisi I memberikan apresiasi kepada TNI terhadap komitmennya dalam pelaksanaan agenda reformasi TNI. “Kita lihat TNI di Indonesia menjadi kekuatan pertahanan negara yang semakin profesional dan semakin sebangun sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia,” katanya.

Mahfudz menjelaskan bahwa sejak 2010 TNI telah memulai Program Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang merupakan satu program sangat strategis dan dilandasi oleh Rencana Strategis (Renstra) modernisasi

alutsista menuju *Minimum Essential Forces* yang dikembangkan dalam 3 tahapan renstra.

Menurut Mahfudz, Laksamana TNI Agus Suhartono hampir menyelesaikan renstra tahap I dan diujung penyelesaian renstra tahap I ini ada transisi kepemimpinan ke Panglima yang baru.

“Tentunya tahun 2015 Panglima yang baru akan memulai renstra tahap II, sehingga ketika renstra Tahap I ini bisa dituntaskan pada fase transisi ini akan menentukan keberlanjutan dan kesuksesan renstra modernisasi alutsista tahap II, yang akan dipimpin dan diarahkan panglima yang baru nanti,” imbuhnya.

Setelah melewati proses uji kepatutan dan kelayakan



Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq memberikan ucapan selamat kepada Jenderal TNI Moeldoko.

sepanjang hari Rabu, Komisi IDPR akhirnya menyetujui Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI yang baru. Seluruh fraksi terdiri 9 fraksi di Komisi Bidang Pertahanan DPR ini sepakat menerima usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengajukan Moeldoko menjadi Panglima TNI yang baru menggantikan Laksamana Agus Suhartono.

“Setelah menyampaikan pandangan, semua fraksi memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan SBY yaitu Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI periode berikutnya,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Selanjutnya, Komisi I DPR akan segera melaporkan secara tertulis hasil uji kepatutan dan kelayakan ini kepada Pimpinan DPR untuk kemudian dibawa ke Sidang Paripurna pada 27 Agustus 2013. (as) Foto: ry/parle.

Komisi I Harapkan TNI Berkelas Dunia

Indonesia semakin memperkuat perannya di dunia internasional. Komisi I DPR RI mengharapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara cepat membangun TNI berkelas dunia.

“Pengakuan dunia internasional terhadap TNI juga semakin baik, ini menjadi tantangan serta dorongan untuk mempercepat profesionalisme TNI, moderisasi alutsista. Secara cepat membangun TNI sebagai Tentara Nasional Indonesia Berkelas Dunia,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, saat memimpin fit and proper test Jenderal TNI Moeldoko sebagai Calon Panglima TNI, di Gedung DPR, Rabu (21/8).

Dikatakan Mahfudz, bahwa sejak be-

berapa tahun yang lalu Indonesia semakin memperkuat perannya di dunia Internasional, dan bukan saja dari sisi kebijakan luar negeri tetapi juga peran serta TNI di dunia Internasional pun juga semakin kuat. “Kita menyaksikan partisipasi TNI dalam *peace keeping operation*, dan keterlibatan TNI sebagai *observer* di wilayah konflik dibelahan dunia,” paparnya.

Selain itu, menurutnya saat ini kompleksitas bentuk dan sifat ancaman semakin berkembang dan canggih. Hal ini menjadi tantangan baru yang harus dijawab secara cepat dan tepat oleh TNI sebagai garda depan pertahanan negara, ditambah dinamika politik kawasan yang semakin memanas.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin memberikan ucapan selamat kepada Jenderal TNI Moeldoko.

“Saya kira TNI mencermati perkembangan ini, harus direspon secara cepat dan tepat karena dinamika ini bisa menghasilkan ancaman secara nyata bagi Indonesia,” tegas Mahfudz politisi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). (as) Foto:ry/parle.

Upacara Bendera 17 Agustus Momen Penting Ingatkan Sejarah Perjuangan Bangsa

Sekretaris Jenderal DPR-RI Winantuningtyastiti mengatakan, upacara bendera tanggal 17 Agustus tidak hanya sekedar ceremonial, tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi kita menggugah kembali ingatan kita atas sejarah perjuangan bangsa.

“Nah, di dalam momen-momen seperti ini penting sekali untuk mereview kembali ingatan kita bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Bangsa yang memang harus bersatu, harus mendukung seluruh upaya untuk memajukan bangsa ini,” ujarnya sesuai memimpin Upacara Bersama Setjen MPR, DPR dan DPD dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 68 Sabtu 17 Agustus 2013 di halaman

Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut Sekjen DPR, di era reformasi ini kita juga tidak bisa mengisinya dengan *euphoria* tetapi justru harus mengingat jasa-jasa para pahlawan bangsa yang tidak mudah untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini.

Menanggapi hasil-hasil yang dicapai bangsa setelah 68 tahun merdeka, dia menyebutkan, secara proses bertahap itu banyak sekali kemajuan. “Harus diakui, seperti disampaikan dalam pidato Presiden, tentu banyak hal yang sudah kita nikmati yang merupakan *progress positif* dari upaya membangun bangsa dan memajukan bangsa,” ungkapnya.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti.

Misalnya, tingkat kemiskinan turun, tingkat pengangguran juga turun. Tentu masih banyak kekurangan yang harus kita pikul bersama, elemen sekecil apapun memang harus turut berkontribusi di bidangnya masing – masing, di lingkungannya masing – masing untuk mendukung kesuksesan ini.

Meski demikian, dia mengakui kinerja aparaturnya kadang-kadang masih ada egoisme sektoral, masih ada yang ingin sukses sendiri padahal tidak mungkin kita bekerja sendiri untuk mendukung cita-cita bangsa yang begitu besar.

“Jadi memang harus bersatu. Harus ingat saudara-saudara kita yang tinggal di daerah perbatasan, yang begitu berkekurangan, sulit sekali menjangkau pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, itu yang harus kita angkat bersama,” ungkap Win.

Sekjen DPR menegaskan, posisi DPR itu strategis karena tidak ada kebijakan negara yang keluar tanpa melalui proses dari DPR. Karena itu dia berharap, segenap jajaran Setjen DPR bisa mendukung sepenuhnya kegiatan Dewan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat bersama-sama dengan pemerintah. (wy,mp)/foto:wahyu/parle/iv.

Anggota DPR Adiyaman Amir Saputra Meninggal Dunia

Innalillahi wainna ilaihi roji'un. Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR-RI Laksamana Muda TNI (Purn) H Adiyaman Amir Saputra, S.IP meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, Jumat (16/8), pukul 18.12 WIB. Jenazah Anggota Komisi IV DPR RI tersebut disemayamkan di rumah dinas almarhum di Kompleks DPR-RI Blok C1, Kalibata, Jakarta.

Esok paginya tepat pukul 10.30 WIB jenazah tiba di Masjid Baiturrahman Komplek Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta untuk disholati dilanjutkan dengan prosesi persemayaman di Loby Gedung Nusantara, Komplek DPR RI.

Dalam sambutannya saat prosesi persemayaman yang dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan bahwa Almarhum selalu menjalankan tugas partai dengan baik. “Oleh karenanya saya kaget ketika mendengar informasi beliau meninggal karena selama ini saya melihat penampilan dan aktifitasnya seperti biasa tidak



Ketua DPR RI Marzuki Alie memimpin prosesi persemayaman Adiyaman Amir Saputra.

terlihat tanda-tanda beliau sakit,” kata Marzuki

“Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia kami mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Adiyaman Amir Saputra semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik disisi Allah SWT dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga Allah memberikan keteguhan iman dan ketabahan dalam menerima

ujian dan cobaan,” ucap Marzuki Alie mengakhiri sambutannya.

Ditemui usai prosesi persemayaman, Wakil Ketua Komisi IV Firman Soebagyo selaku kolega mengatakan bahwa almarhum adalah sosok orang yang sangat lugas, punya integritas dan konsistensi yang sangat tinggi dalam membawakan aspirasi. “Walaupun beliau berasal dari fraksi Partai Demokrat tapi terkait masalah kebijakan-kebijakan, regulasi maupun fungsi pengawasan, beliau selalu bicara tentang kepentingan negara dengan berbagai pengalamannya tentang penegakan hukum terhadap masalah *illegal logging*,” kenang Firman.

Adiyaman Amir Saputra terakhir menjadi anggota Komisi IV yang membidangi masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Adiyaman lahir di Cirebon 6 Juli 1950, merupakan purnawirawan anggota TNI sebelum masuk ke kancha politik. (od)foto:wy,od/parle.

Komisi I Tawarkan Amerika Investasi Industri Pertahanan Nasional

Komisi I DPR RI Mendorong kerjasama di bidang militer antara Amerika dengan Indonesia yang diikuti oleh kerjasama bidang ekonomi, menawarkan Amerika untuk ikut juga berinvestasi mengembangkan industri pertahanan nasional Indonesia.

DPR RI menerima kunjungan delegasi Kongres Amerika Serikat, yang diwakili *Representative* Edward R. Royce, Ketua Komite Luar negeri Kongres Amerika Serikat dan *Representative* David Cicilino, di Gedung Parlemen, Senin (19/8).

“Komisi Luar Negeri dan Pertahanan, Komisi I selama ini mendorong kerjasama dibidang militer antara Amerika dengan Indonesia, tetapi ini juga harus diikuti oleh kerjasama di bidang ekonomi, dengan menawarkan Amerika untuk ikut juga berinvestasi mengembangkan industri pertahanan nasional Indonesia,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, dalam keterangan pers.

Pertemuan tersebut, membicarakan tentang sejumlah hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan hubungan antara Amerika dengan Indonesia, karena kami melihat kedepan kerjasama Indonesia dan Amerika harus semakin meningkat, dan juga semakin berimbang.

“Kedua negara sepakat membangun komunikasi antar parlemen Indonesia dan Parlemen Amerika, untuk saling mengenal mengenai perkembangan yang terjadi di kedua negara, yang



Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menerima delegasi Kongres Amerika Serikat.

akan menjadi modal penting untuk hubungan bilateral antara Indonesia-Amerika, yang telah dilandasi dengan kesepakatan *Comprehensive Strategic Partnership*,” katanya.

Mahfudz menjelaskan bahwa Komisi I juga menanyakan mengenai sikap Amerika untuk meratifikasi *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty-CTBT* atau pelarangan uji coba nuklir. Selain itu juga termasuk menanyakan bagaimana sikap Amerika terhadap situasi yang berkembang di Mesir.

Waspada Samudra Hindia

Anggota Komisi I Husnan Bey Fanie mengatakan dalam pertemuan tersebut, secara khusus menyoroti dan mempertanyakan soal keberadaan 2500 marinir AS yang ditempatkan di pulau *Cocos island* yang dekat dengan pulau *Christmas island* Australia, di Samudra Hindia. “Saya tanyakan apa alasan kuat dan argumentasi penempatan marinir AS di pulau tersebut,” katanya.

Namun jawabannya, menurut Husnan sangat normatif dan diplomatis, bahwa pasukan marinir ditempatkan atas dasar kerjasama militer yang dijalankan dengan Australia, dan membantu negara-negara di kawasan Asia, saat menghadapi bencana alam.

“Atas jawaban itu, tidak memuaskan dan tetap mengganjal karena tidak mungkin sesederhana itu, penempatan pasukan marinir AS di Australia sebesar itu,” tegasnya.

Menurut Husnan, pasti memang AS memiliki agenda besar dalam menempatkan pasukannya di Australia, baik dalam jangka pendek dan panjang. Karena itu, perlu saya ingatkan pada Pemerintah RI dan masyarakat dalam negeri, tetap harus waspada atas penempatan pasukan marinir AS di Australia itu.

“Pasukan itu tak ubahnya sebagai *spy drone* yaitu pasukan mata-mata atau *striking down* pasukan yang ditempatkan sebagai pasukan penyerang nantinya,” katanya. (as)/foto:odjie/parle/iw.

Palu Komisi III Masih untuk Pasek

Mengawali Masa Persidangan I tahun sidang 2013-2014, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menetapkan jajaran pimpinan Komisi III. Sejumlah pemberitaan yang menyebut Ketua Komisi yang sesuai kesepakatan berasal dari Fraksi Partai Demokrat akan

diganti ternyata tidak terbukti.

“Saya menerima surat dari Fraksi Demokrat yang bersifat rahasia dengan nomor 570 tertanggal 19 Agustus kemarin menugaskan sebagai Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika. Surat

diteken Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf dan Sekretaris Saan Mustafa,” ungkapny saat memimpin sidang di ruang rapat komisi, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Usai meminta persetujuan dari



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyerahkan palu kepemimpinan kepada Gede Pasek Suardika.

seluruh peserta sidang, Priyo secara khusus juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi III dari FPD Ruhut Sitompul yang santer disebut akan menjabat posisi itu. "Terima kasih Pak Ruhut sudah legowo hatinya, Tuhan nanti akan menuntun hal lain yang

lebih besar," lanjutnya.

Sejumlah anggota komisi sempat mengajukan pertanyaan terkait munculnya nama Ruhut Sitompul sebagai ketua komisi yang baru. "Saya pribadi bahkan telah menyampaikan ucapan

selamat kepada Pak Ruhut dalam satu siaran televisi," kata Syarifudin Suding dari FP Hanura.

Anggota Komisi III dari FPD Dasrul Jabbar mengingatkan agar semua pihak mengacu kepada ketentuan dalam UU MD 3 bahwa penetapan pimpinan alat kelengkapan harus berdasarkan putusan resmi fraksi. "Saya rasa surat fraksi adalah resmi, itu sesuai aturan yang menjadi acuan kita. Kalau ada komentar lain silahkan, tapi sampaikan diluar sidang komisi," pungkas dia.

Sidang penetapan itu berlanjut dengan penyerahan palu secara resmi oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada jajaran pimpinan terpilih Gede Pasek Suardika, Al Muzammil Yusuf (Wakil Ketua/FPKS) dan Tjatur Sapto Edi (Wakil Ketua/FPAN). Wakil Ketua dari FPG Aziz Syamsudin tidak hadir karena mengikuti kegiatan lain. Penetapan tersebut berarti tidak ada perubahan pimpinan di komisi yang membidangi masalah hukum ini. (iky)/foto:rizka/parle/iw.

Aksi Teror Pada Polisi Harus Dikalahkan



Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika.

Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika menyebut penembakan anggota kepolisian di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek sebagai aksi teror yang harus dikalahkan. Ia meminta jajaran kepolisian meningkatkan *moral force* untuk menghadapi para pelaku.

"Ini aksi teror yang harus dikalahkan, *moral force* polisi perlu ditingkatkan. Himbauan jangan keluar berseragam itu tidak tepat, seharusnya keluar tunjukkan kemampuan, lawan itu teroris," tegasnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8/13).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menekankan kehadiran polisi berseragam penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Langkah prioritas perlu ditetapkan dalam menghadapi kondisi ini diantaranya meningkatkan kewaspadaan dan sistem pengamanan aparat di semua lini.

"Memang dalam melaksanakan tugas polisi ada yang menggunakan

pakaian sipil tetapi perlu dicatat kalau masyarakat melihat tidak ada polisi berseragam malah merasa *nggak tenang* nanti," imbuhnya.

Publik dikejutkan oleh kasus penembakan yang mengakibatkan 4 petugas meninggal dalam sebulan terakhir. Dua anggota Polsek Pondok Aren, Brigadir Kepala Ahmad Maulana dan Ajun Inspektur Dua Kus Hendratma ditembak di Jalan Graya Raya, Pondok Aren, Tangerang. Penembakan lain menimpa anggota satuan Bina Masyarakat Polsek Cilandak Ajun Inspektur Satu Dwiyatno dan anggota Polsek Gambir Ajun Inspektur Dua Patah Saktiyono. (iky) Foto:wy/parle.

Komisi VIII Minta *Screening* Jemaah Haji Harus Diperketat

Screening kesehatan bagi calon jemaah haji harus lebih diperketat, karena jika kebanyakan kelonggaran nanti pihak penyelenggara dan petugas haji akan kesulitan sendiri.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah terkait dengan adanya pemberitahuan dan peringatan resmi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi atas penyebaran virus *Corona Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) di negara tersebut.

Namun ditambahkan Ledia, saat Komisi VIII bertemu dengan Dubes Arab Saudi beberapa waktu lalu, diketahui bahwa hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan mengingat jemaah haji Indonesia selama ini tergolong tertib dan taat dalam mengikuti aturan, termasuk yang terkait dengan kesehatan.

“Saat Ramadhan kemarin, ada pembicaraan dengan Dubes Arab Saudi mengenai terjangkitnya virus corona di Negara-negara Timur Tengah. Tapi hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan

bagi Jemaah Indonesia yang tergolong tertib dan taat, dimana selama ini juga telah dilakukan pengecekan kesehatan. Termasuk pemberian berbagai vaksin, seperti vaksin Meningitis sebelum Jemaah berangkat ke tanah suci,” jelas Ledia.

Dikatakannya, kekhawatiran justru terjadi pada jemaah asal Afrika, yang termasuk kurang taat terhadap kesehatan, ditambah di Negara tersebut telah terjangkit berbagai penyakit seperti *Yellow Fever* dan *Meningitis*.

Khusus untuk virus corona yang tengah mewabah di Arab Saudi, menurut Ledia karena belum ditemukan vaksin bagi pencegahan dan pengobatannya, maka yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia terhadap calon jemaah hajinya adalah dengan melakukan *screening* yang ketat tadi, ditambah pemberian vaksin Meningitis, selain tentunya pemberian vitamin sebagai penambah daya tahan tubuh bagi para calon jemaah haji.

“Insya Allah Kamis (22/8) nanti kami akan bertemu dengan Dirjen PHU (Per-



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa.

jalanan Haji dan Umrah), dan mengenai terjangkitnya wabah corona di Timur Tengah itu jika nanti dianggap sebagai sesuatu yang penting, mungkin akan ada pembicaraan khusus mengenai hal itu,” ungkap politisi dari FPKS ini.

Selain itu yang harus diperhatikan, menurut Ledia adalah sosialisasi dan penyuluhan pada calon jemaah haji, bagaimana cara mengatasi jika calon jemaah haji mengalami indikasi terjangkit virus tersebut. (Ayu) foto:ry/parle

Pemerintah Optimalkan APBN Sebagai Stimulus Ekonomi



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman dan Menkeu Chatib Basri.

Pemerintah sepakat dengan pandangan seluruh fraksi di DPR RI untuk mengoptimalkan peran APBN sebagai stimulus perekonomian. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (20/8).

Peran APBN juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pasar domestik sebagai pendorong pertumbuhan dan perlunya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan. Fokus pengeluaran anggaran tentu ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Disamping itu, tertib dan disiplin anggaran juga terus ditingkatkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pertanggungjawabannya sesuai UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Pandangan pemerintah ini dikemukakan sebagai jawaban atas pandangan fraksi-fraksi di DPR tentang RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2012. Rapat Paripurna

kali ini dipimpin Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman.

Soal angka-angka asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah seperti disampaikan Menkeu, telah mengajukannya se-realistic mungkin. Pengajuan angka asumsi dasar tersebut tentu dengan meningkatkan akurasi perhitungan.

“Dalam penetapan asumsi tersebut telah dikoordinasikan dengan lembaga terkait antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Negara PPN/Bappenas,” ungkap Menkeu. Pihak pemerintah juga menanggapi pan-

dangan DPR agar penyusunan asumsi makro berdimensi jangka panjang.

Menurut pemerintah, dalam menyusun Nota Keuangan dan RAPBN, pihaknya mengaku telah mengajukan gambaran perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dalam jangka menengah. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN. (mh)foto:wahyu/parle.

Pimpinan Komisi VII DPR Tetap Formasi lama

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengesahkan nama Pimpinan Komisi VII DPR, dengan formasi pimpinan tetap yaitu Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, Wakil Ketua yaitu Zainuddin Amali, Achmad Fahrial dan Daryatmo Mardiyanto.

“Untuk Komisi VII DPR saya sudah menerima surat dari Pimpinan Fraksi masing-masing, Yaitu Partai Demokrat tetap Sutan Bhatoegana, PDIP menugaskan Daryatmo Mardiyanto, kemudian PPP tetap Achmad Fahrial, kemudian Golkar menugaskan Zainuddin Amali,” ujar Priyo saat memimpin pergantian Pimpinan Komisi VII DPR, di Gedung Nusantara I, Selasa (20/8).

Mengenang perjalanan hidup dirinya, Priyo mengatakan, sebelum menjadi pimpinan DPR, dia bersama dengan Pramono Anung, Hatta Radjasa sempat mengecap bangku anggota di Komisi energi. “Banyak tokoh hebat berasal dari Komisi VII DPR,” kenangnya.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso berjabat tangan dengan Wakil Ketua Komisi VII Achmad Fahrial.

Menurut Priyo, seharusnya ini merupakan tugas Wakil Ketua DPR lainnya, namun karena berhalangan akhirnya ditugaskan dirinya. “Saat pengesahan pimpinan Komisi III DPR tadi, sempat terjadi kehebohan bahkan saya menunggu surat resmi sampai tanggal 19 Agustus 2013, terkait Pergantian pimpinan,” ujarnya. (si)foto:iwan armanias/parle.

DPR Minta Militer Menarik Diri Dari Panggung Politik Mesir

Terkait bentrokan antara pengunjuk rasa dan militer di Mesir yang menewaskan ratusan orang pendukung Presiden Mesir terguling Mohammad Mursi beberapa waktu lalu, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta aspirasi masyarakat Mesir yang menginginkan hasil Pemilu Demokratis itu tidak dinodai.

Mahfudz juga meminta pihak militer harus menarik diri secara total dari panggung politik di Mesir termasuk menghentikan semua aksi-aksi kekerasan bersenjata secara sistem.

“Respon dunia sekarang ini yang cukup keras terhadap Mesir yang

membuat rezim militer tidak bergeming, salah satu langkah konkret adalah seperti yang saya usulkan beberapa waktu lalu, Indonesia menarik Dubesnya, kemudian Presiden berkonsultasi dengan Dubes mengenai situasi mutakhir di Mesir dan bagaimana menyikapinya,” kata Mahfudz usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan acara Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat pekan lalu (16/8).

Penarikan Dubes ini, menurut Mahfudz, tidak akan banyak berpengaruh terhadap urusan-urusan perlindungan WNI karena secara teknis sudah banyak

pejabat di sana, tetapi ini memberikan sinyal politik penting. Karena posisi Indonesia di mata Mesir itu sangat kuat dan sangat dihargai.

“Sehingga menurut saya jika ada satu terobosan politik yang dilakukan oleh Indonesia ini akan mampu memberikan tekanan, siapapun pihak di Mesir untuk kembali memulihkan situasi kondisi di sana,” jelas Mahfudz.

Mahfudz menjelaskan bahwa sudah ada upaya-upaya melakukan komunikasi termasuk apeal kepada lembaga-lembaga multilateral, tetapi secara bilateral belum nampak. Komunikasi selama ini baru dilakukan di level legislatif.



“Pimpinan DPR saya hormati sudah berkunjung, Komisi I sebelumnya juga sudah pernah berkunjung. Mereka membutuhkan penguatan dari Indonesia terhadap proses demokrasi yang terjadi di sana,” tegas politisi PKS.

“Kita waktu itu bertemu dengan parlemen, semuanya sepakat bahwa proses transisi ini harus di perkuat,” tambahnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa himbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait



Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq.

insiden di Mesir, yang menghimbau agar tidak terjadi pelanggaran kemanusiaan.

Menurutnya, pemerintah Indonesia belum berani mengambil sikap. “Posisi politik, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bukan berarti kita tidak berani mengambil sikap,” tegas Rieke.

“Pada point-point tertentu apapun alasannya, pemberangusan terhadap kemanusiaan itu tidak dibenarkan. Indonesia harus berani mengambil sikap,” jelas Rieke. (sc)/foto:odjie/parle/iv.

Komisi VIII DPR Bahas Skenario Haji 1434 H

Banyak perubahan dalam skenario pelaksanaan ibadah haji tahun ini (1413 H/2013 M). Komisi VIII meminta penjelasan rinci dari mulai soal pemondokan, catering, transportasi, hingga soal pemotongan kuota haji tahun ini.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII yang dipimpin Wakil Ketuaannya Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS) dan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII lainnya Gondo Raditio Gambiro (F-PD), dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU), Kementerian Agama Anggito Abimayu, Kamis (22/8).

“Ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam RDP, yaitu skenario dan persiapan akhir yang telah dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 Hijriah / 2013 Masehi, baik di dalam negeri maupun di wilayah perhajian,” kata Ledia saat memimpin rapat.

Isu kesehatan kontemporer juga mengemuka dalam rapat tersebut. Saat ini ada perbincangan soal penyebaran virus corona. Untuk itu, *screening* kesehatan dari Kementerian Kesehatan perlu segera dilakukan. Komisi VIII tentu berharap agar pelayanan haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah didampingi Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Raditio Gambiro memimpin RDP dengan Dirjen PHU.

Sementara itu, Dirjen PHU Anggito Abimayu, menjelaskan, akibat pemotongan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi, maka jamaah haji reguler yang semula 194.000 kini menjadi 155.200 jamaah. Haji khusus semula berjumlah 17.000 menjadi 13.600. jumlah kloternya juga berubah. Bila sebelumnya 484 kloter kini tinggal 385 kloter. Sementara maktabnya berubah dari 72 menjadi 48.

Kebijakan pemotongan kuota ini juga berdampak pada tertundanya hampir 25 ribu jamaah yang telah lunas. Program percepatan lansia 83 tahun untuk mendapatkan prioritas ibadah haji tertunda. Dampak paling dirasa-

kan dari pengurangan kuota ini adalah waktu tunggu jadi semakin lama. Dan kerugian pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sebesar Rp 817 miliar.

Pada bagian lain, Anggito menjelaskan, peningkatan kualitas petugas dan pembimbing haji menjadi fokus kebijakan ibadah haji tahun ini. Meskipun terjadi pemotongan kuota haji hingga 20%, kewaspadaan kesehatan dan pelayanan haji terus ditingkatkan. “Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1413 H sudah mencapai 80%. Yang krusial adalah lambatnya proses amandemen kontrak pemondokan di Makkah,” kata Anggito. (mh) foto:ry/parle.

Lemahnya Nilai Tukar Rupiah Cukup Mengkhawatirkan



Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo.

Rapat Paripurna baru saja dibuka oleh Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, namun Anggota Komisi I Tjahjo Kumolo sudah mencecar Menteri Keuangan Chatib Basri yang turut hadir dalam rapat. Tjahjo mempertanyakan langkah konkret yang akan diambil pemerintah terkait dengan makin melemahnya

rupiah terhadap dolar AS.

Politisi PDI Perjuangan ini mencermati kondisi saat ini, rupiah berpotensi bergerak makin liar. Menurutnya, pelemahan rupiah terhadap dolar saat ini cukup mengawatirkan. Pasalnya, pelemahan mata uang rupiah ini yang terdalam terjadi dibandingkan mata uang lain di negara-negara kawasan regional Asia.

“Pelemahan ini kami catat terus bergerak. Jika tidak ada perbaikan, salah satunya akan mengganggu neraca perdagangan, pelemahan nilai komposisi dan ekspor impor,” cecar Tjahjo dalam interupsi Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (20/8).

Tjahjo juga mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan di media-media, yang tenang dan terkesan normatif dan menyatakan bahwa kondisi

pelemahan rupiah masih dalam kondisi aman.

“Aman buat siapa? Seluruh pengusaha menengah ke atas mengeluh. Tidak ada kebijakan yang lebih progresif dari pemerintah. Mungkin Pak Menteri lebih ahli dalam menata hal ini,” tandasnya.

Ia menambahkan, DPR perlu mengantisipasi hal ini, agar tidak timbul keresahan di para pengusaha. Oleh karena itu, ia meminta pernyataan resmi pemerintah terkait langkah konkret pemerintah untuk menyikapi kondisi ini.

“Saya ingin ada *statement* resmi dari pemerintah, apa langkah-langkah konkret pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan,” pinta Tjahjo. (sf)/
foto:odjie/parole/iv.

Komisi I Telusuri Rekam Jejak Jenderal TNI Moeldoko



Anggota Komisi I DPR berjabat tangan dengan Jenderal TNI Moeldoko.

Komisi I DPR RI telah menerima beberapa dokumen administratif dari Calon Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Hasil klarifikasi pemeriksaan secara administratif, yaitu laporan kekayaan calon Panglima TNI yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedua Salinan Laporan Pajak (SPT), Laporan Pemeriksaan Kesehatan, dan *curriculum vitae*.

Komisi I juga melengkapi dan klarifikasi ke Komnas HAM dan KPK terhadap calon panglima TNI. “Komisi telah menugaskan beberapa anggotanya yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin untuk melakukan pengecekan dan mendapatkan keterangan langsung dari KPK dan Komnas Ham,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, saat memimpin *fit and proper test* Jenderal TNI Moeldoko sebagai

Calon Panglima TNI, di Gedung DPR, Rabu (21/8).

TB. Hasanudin melaporkan hasil Kunjungan Komisi I ke Komnas Ham dan KPK dalam rangka pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan Calon Panglima TNI, yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013.

Hasil dari pertemuan tersebut sebagai berikut : Kesimpulan pertemuan dengan Ketua Komnas HAM, pertama sampai hari ini Komnas HAM tidak

pernah mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai Jenderal TNI Moeldoko, kedua mengenai tentang Operasi Sajadah ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, Komnas HAM telah melakukan investigasi tetapi tidak terdapat bukti pelanggaran HAM, dengan demikian Jenderal TNI Moeldoko tidak memiliki masalah atau urusan pelanggaran Hak Azasi Manusia. Ketiga harapan yang disampaikan Komnas HAM adalah berharap ada kerjasama lebih lanjut dengan institusi TNI.

Pertemuan dengan KPK, Komisi I mencatat yang disampaikan KPK, adalah pertama TNI telah melakukan Mou dengan KPK yang dilakukan oleh Laksamana Agus Suhartono bahwa TNI berkomitmen mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kedua menyangkut personil khususnya Jenderal TNI Moeldoko sebagai Calon Panglima TNI sampai hari ini rekam jejaknya tidak ada masalah. (as) foto:ry/parle

Timwas Century DPR Segera Panggil Tim Pemburu Aset

Tim Pengawas DPR untuk kasus Century akan segera memanggil Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Amir Syamsuddin dan pejabat terkait lainnya minggu depan untuk dimintai konfirmasi soal perburuan aset-aset Century di luar negeri.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyampaikan hal tersebut kepada wartawan usai memimpin rapat tertutup Timwas Century, Rabu (21/8). "Rapat memutuskan minggu depan kita memanggil Menkum HAM sebagai Ketua Tim pemburu aset dan menteri-menteri lain untuk menyampaikan hasil aset-aset yang bisa diselamatkan di

beberapa negara, itu apa saja, seperti di Hongkong dan Swiss," kata Priyo.

Timwas Century, ungkap Priyo, sudah lama menanti progres tim pemburu aset tersebut. "Kita mintakan hasil konkretnya itu apa, karena sudah sekian lama ditunggu." Selanjutnya, Timwas juga kembali akan memanggil KPK dua minggu kemudian untuk meminta progres penyidikan kasus ini.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dan beberapa anggota Timwas Century DPR.

Seperti diketahui, KPK juga telah melakukan investigasi dengan menelusuri aset-aset Century hingga ke luar negeri. Bahkan, telah memeriksa Sri Mulyani di Amerika. Banyak temuan penting yang telah diperoleh KPK. Pada saatnya nanti, Timwas Century juga ingin mengetahui temuan-temuan apa saja yang sudah didapat, sekaligus ingin mengetahui perkembangan penyidikannya.

Sementara itu, Anggota Timwas Century Fahri Hamzah (F-PKS) menyatakan, saat ini yang paling penting uang dari aset-aset Century kembali dahulu. Namun, ia meyesalkan hingga kini perburuan aset-aset uang tersebut belum juga kembali ke dalam negeri. "Kita penginnya kasus ini yang penting uang balik dulu. Tapi, uangnya enggak ada sampai sekarang," ucap Fahri. (mp, mh) Foto: wy/parle.

Sekjen DPR Terima Delegasi Indonesian *Interfaith Scholarship*



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima Delegasi Indonesian Interfaith Scholarship.

Indonesia membebaskan warga Negara dan rakyatnya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga terjadi toleransi dan harmoni di antara umat beragama.

Hal tersebut diungkapkan Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti saat me-

nerima Delegasi Indonesian Interfaith Scholarship (IIS) pada Selasa (20/8) sesaat sebelum berlangsungnya sidang paripurna DPR RI.

Menurut Win, terjadinya kerusuhan atas sikap beberapa kelompok minoritas itu sebenarnya bukan disebabkan karena permasalahan agama,

melainkan aktifitas-aktifitas kelompok tersebut yang merugikan masyarakat. Mengenai hal tersebut, Win mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum.

“Sebagaimana *Interfaith Dialogue* lainnya, dialog yang dilakukan oleh IIS ini topik utamanya mengenai agama, pendidikan dan Hak Asasi Manusia. Disini IIS ingin mengetahui sejauh mana peran DPR RI terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia,” jelas Win.

Ditambahkan Win, IIS sendiri anggotanya terdiri dari beberapa organisasi dunia, diantaranya Kementerian Luar Negeri Eropa, dan Pejabat di Pusat Studi Kebijakan Eropa. Dari sana, Win berharap agar IIS mengetahui dengan jelas kebijakan, dukungan dan peran DPR RI dalam mendukung dan menciptakan kerukunan terhadap umat beragama. (wy/ayu)foto:wahyu/parle

Menag Salah Artikan Perintah Presiden

Menteri Agama salah mengartikan perintah Presiden atas penanganan kasus warga Syiah Sampang. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Adang Ruchiatna Puradiredja pada Rabu (21/8) sesaat setelah berlangsungnya rapat internal Komisi VIII.

“Perintah Presiden, mereka (Warga Syiah Sampang) harus dikembalikan ke kampung halamannya, tapi dijabarkan berbeda oleh menteri agama,” ujar Adang.

Adang melanjutkan bahwa relokasi warga syiah selama ini memang bersifat sementara atau tidak selamanya. Dengan begitu dugaan atau sangkaan beberapa pihak yang mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran terhadap

kebebasan beragama tidak terbukti. Dimana warga Syiah tersebut sudah bertahun-tahun hidup dan tinggal di daerah tersebut.

Sebagai tindak lanjutnya, ditambahkan Adang, Komisi VIII dalam beberapa hari ke depannya akan mempertanyakan kepada Menteri Agama.

“Kapan mereka akan dikembalikan ke daerahnya atau ke kampung halamannya, nanti kita akan tanyakan kepada Menteri Agama,” ungkap Adang.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) melalui Anggotanya, Albert Hasibuan saat mengunjungi pengungsi Syiah di Sidoarjo meminta pemerintah kabupaten Sampang untuk mengembalikan mereka ke kampung



Anggota Komisi VIII DPR RI Adang Ruchiatna Puradiredja.

halamannya.

Sikap yang memaksa warga Syiah mengungsi ke Sidoarjo merupakan tindakan tidak tepat dan tidak manusiawi. Bahkan lebih lanjut, Albert mengatakan pemindahan ke rusunawa dekat Pasar Puspo Argo, Sidoarjo itu tidak menyelesaikan masalah konflik Syiah dan anti-Syiah. (Ayu) Foto:ry/parle.

DPR Kritisi RAPBN 2014 Dari Soal Pengentasan Kemiskinan, *Lifting* Minyak hingga Pertumbuhan Ekonomi

Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2013. Dalam RAPBN tersebut, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.662,5 triliun, sementara anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp 1.816,7 triliun.



Jubir F-PPS Martri Agoeng.

Menanggapi Rancangan APBN 2014 dan Nota Keuangannya, Fraksi PKS memandang target penurunan angka kemiskinan menjadi 9-10 persen pada tahun 2014 masih konservatif dan perlu dibuat progresif. Fraksi PKS menilai angka tersebut masih sangat jauh dari target RPJMN 2014 sebesar 8 persen.

Jubir FPKS Martri Agoeng mendesak pemerintah untuk meningkatkan kebijakan pengentasan kemiskinan terutama masalah di hulu yang banyak berakar dari pedesaan dan sektor pertanian. Kemiskinan di kota juga akibat dari urbanisasi penduduk miskin dari desa ke kota. Sehingga diperlukan kebijakan untuk pembangunan pedesaan dan pertanian bisa lebih progresif.

“Kebijakan penting yang perlu dituntaskan oleh pemerintah adalah implementasi kebijakan reforma yang sudah dijanjikan kepada petani di pedesaan. Fraksi PKS meyakini bahwa tanpa langkah yang sungguh-sungguh untuk

menjalankan reforma agrarian, maka kemiskinan yang didominasi petani, akan sulit dituntaskan,” papar Martri.

Terkait dengan sektor pertanian, pemerintah menargetkan swasembada untuk lima komoditas pangan yang meliputi beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi pada tahun 2014. Namun semua produk tersebut masih impor. Pemerintah juga akan menciptakan surplus beras 10 juta ton. Namun, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan bagaimana langkah mencapainya masih perlu mendapat perhatian. Sebab, dalam RAPBN 2014 pemerintah hanya mengalokasikan Rp 2,4 triliun untuk pembangunan jalan dan irigasi pedesaan.

“Kami menilai, bagaimana itu bisa tercapai jika anggaran hanya sekian banyaknya. Bahkan selama ini, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan petani seperti alat dan sarana produksi masih kurang mendapat perhatian,” jelas Juru Bicara Fraksi PPP Epyardi Asda.



Jubir F-PPP Epyardi Asda.

Hal senada diungkapkan Juru Bicara Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon. Ia mendesak Pemerintah fokus pada kebijakan kedaulatan pangan di berbagai bidang seperti swasembada beras, gula, kedelai, jagung, garam, daging dan perikanan. Palsanya, melalui cara



Jubir F-Partai Hanura Nurdin Tampubolon.

ini diharapkan dapat mengurangi impor dan mendorong peningkatan ekspor Indonesia.

“Kecenderungan tingginya harga pangan dunia meningkatkan produksi dan nilai tambah produk pertanian kita, dimana Indonesia sebagai negara agraris melintasi sumber daya pertanian dapat memperoleh pendapatan tahun 2011 sebesar 2 juta ton dan tahun 2012 sebesar 1 juta ton,” jelas Nurdin.

Atasi Kesenjangan Pendapatan

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Yasonna H. Laoly mengatakan, selama 3 tahun terakhir angka

nilai tukar petani Indonesia hanya pada angka 105, artinya hanya cukup untuk melawan inflasi. “Melihat kondisi tersebut, maka RAPBN 2014 sebesar Rp 1.662,5 triliun lebih itu hendaknya lebih dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat yang masih dalam kemiskinan, berdaya beli rendah, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan

petani, nelayan dan buruh,” tandas Yasonna

Ia menambahkan, Indeks Daya Saing Global Indonesia semakin menurun dan posisi Indonesia terbawah di kawasan regional Asia. Pada saat



Jubir F-PDI Perjuangan Yassona H. Laoly.

yang sama angka kesenjangan pendapatan meningkat tajam mencapai 0,1. Artinya, kesuksesan pembangunan ekonomi hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat Indonesia saja, dan sebagian besar masyarakat semakin terhimpit secara ekonomis.

“Meningkatnya kesenjangan pendapatan itu bukan tidak mungkin mengakibatkan meningkatnya kejahatan kekerasan beberapa waktu terakhir. Karena itu kami minta pemerintah memberi perhatian yang serius soal kesenjangan pendapatan ini,” tegas Yasonna.

Saat ini, ungkap Anggota Komisi II ini, masih terdapat 181 daerah tertinggal, 84% rakyat hanya mampu berbelanja di bawah Rp 1 juta perbulan, bahkan masih ada yang hanya Rp 500 ribu/perbulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rakyat yang dikategorikan miskin pada tahun 2009 berjumlah 53 juta penduduk, namun hingga kini masih menyisakan 52 juta penduduk. Sebanyak 40 juta rakyat masih mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar. “Angka ini sama dengan posisi tahun 2009,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan Fraksi PAN dengan menyatakan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum sepenuhnya merata di setiap daerah.

Oleh karena itu, Fraksi ini meminta agar pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak hanya dijabarkan dalam angka-angka pencapaian suatu target, tetapi

harus merefleksikan pemerataan pada masing-masing daerah agar tidak terjadi kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, namun kesenjangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibeskan.

“Proyeksi RAPBN tahun 2014 dari sisi pendapatan negara sebesar Rp 1662,5 triliun merupakan modal utama bagi sumber pembiayaan pembangunan dari upaya pemerintah selama ini melalui penyempurnaan kebijakan dan pendapatan pajak penghasilan. Fraksi PAN mengapresiasi usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan sektor perpajakan,” papar jubir F-PAN Sukiman.

Target Terlalu Tinggi

Fraksi Gerindra memandang pemerintah tidak perlu menetapkan target yang terlalu tinggi kalau pada akhirnya tidak tercapai. Pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 6,4 persen atau naik 0,1 persen dari 2013 yang sebesar 6,3 persen.

“Faktor internal APBN kita yang lebih besar pasak daripada tiang, perlu diperhitungkan dalam penetapan target pertumbuhan. Karena, penetapan target yang terlalu optimistik bisa memicu terjadinya defisit anggaran yang semakin melebar,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Sumarjati Arjoso.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menilai asumsi makro dalam RAPBN 2014 yang ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2014 terlalu rendah yaitu hanya sebesar 6,4 persen. Anggota FPG Dewi Asmara menyatakan RAPBN 2014 seharusnya dapat memberikan stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Namun, nyatanya pemerintah hanya menetapkan indikator makro ekonomi yang sebesar 6,4 persen.



Jubir F-Partai Gerindra Sumarjati Arjoso.

“Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah untuk bekerja lebih maksimal dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terbuka luas, bahkan angka indikator makro ekonomi paling rendah yang diusulkan,” jelasnya.

Terkait dengan *tax ratio*, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam menaikkan *tax ratio*, namun memberikan catatan bahwa *tax ratio* Indonesia masih di bawah rata-rata negara berpendapatan sama. Oleh karena itu, Fraksi Golkar berharap pemerintah lebih mengoptimalkan penerimaan pajak negara, khususnya untuk wajib pajak



Jubir F-Partai Golkar Dewi Asmara.

orang atau pribadi yang masih jauh dari potensi.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Bangsa mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan *tax ratio* menjadi sebesar 14-16% terhadap PDB atau lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 12,6%. Fraksi PKB menyatakan, persentase yang ideal antara belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah harus tetap diper-



Jubir F-PAN Sukiman.

hatikan, dan tetap mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Fraksi PKB tetap meminta pemerintah untuk berhati-hati secara cermat memilih komposisi pembiayaan yang dilakukan baik melalui kebijakan hutang maupun non-hutang,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB Chusnunia Halim.

Target Lifting Minyak

Sedangkan Fraksi PAN memandang bahwa *lifting* minyak bumi yang diperkirakan mencapai 870 ribu barrel per-



Jubir F-PKB Chusnunia Halim.

hari atau meningkat dibandingkan target *lifting* minyak dalam APBN tahun 2013 yang sebesar 840 ribu barrel per hari merupakan target yang optimistik dan itu berarti dicapai jika pemerintah melakukan kinerja yang biasa-biasa saja.

“Pemerintah harus kerja ekstra keras untuk menyelesaikan permasalahan

an dalam sektor hulu migas yang berkaitan dengan kendala-kendala yang sungguh-sungguh. Diantaranya perizinan yang terlalu lambat, masalah keamanan dan koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah dan pengawasan atas *recovery*,” jelas Sukiman.

Hal serupa dipaparkan Fraksi PKB, bahwa penetapan *lifting* minyak bumi yang dipatok sebesar 870 ribu barel per hari dan

juga *lifting* gas bumi sebesar 1.240 ribu barel pada tahun 2014, harus bisa terealisasi. Fraksi PKB mengingatkan, untuk menghindari melesetnya target *lifting* minyak dan gas bumi, pemerintah harus mendapatkan dukungan kesanggupan para kontraktor ke kontrak kerja sama.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar dalam pandangannya memberikan catatan khusus dengan meminta penjelasan pemerintah terkait penurunan asumsi *lifting* minyak yang hanya dipatok sebesar 870 ribu barel per hari dibanding kerangka asumsi makro sebelumnya. Sebelumnya, asumsi *lifting* minyak di kisaran 900 sampai 930 ribu barel per hari.

Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Fraksi Partai Demokrat mengharapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen yang ditetapkan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan terukur, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kualitas itu melalui pembukaan lapangan kerja baru dan penurunan tingkat kemiskinan.

Jubir FPD Paiman meminta pemerintah untuk melakukan penyerapan anggaran di Kementerian dan Lembaga lebih maksimal sehingga bisa berdampak pada perekonomian nasional.

Fraksi Demokrat juga mendukung kebijakan pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Sehingga, alokasi anggaran subsidi hanya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” papar Paiman.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yakin, dengan pertumbuhan ekonomi di dunia tahun 2014 menjadi 3,8 persen dapat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia ke arah lebih baik. Pertumbuhan ekonomi tahun depan meningkat sebesar 0,7 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar 3,1 persen.

Dengan semakin membaiknya tren kondisi ekonomi global dan domestik, Fraksi PKB menyatakan pelaksanaan fiskal pada 2014 tidak hanya ber-



Jubir F-Partai Demokrat Paiman.

sifat fiskal ekspansif yaitu dengan peningkatan ekonomi semata, tetapi juga perlu memperhatikan kebijakan ekonomi lainnya seperti *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment* sehingga kesejahteraan masyarakat makin meningkat.

“Untuk menjaga ekspektasi tahun 2014 tetap terkendali, maka diperlukan adanya peningkatan koordinasi kebijakan antara otoritas moneter, otoritas fiskal, dan sektor riil antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Dan secara umum, struktur inflasi di Indonesia tahun 2014 masih akan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni bahan pangan, energi, dan infrastruktur,” ujar Chusnunia. (sf,mp,if,cs)/foto:odjie/wahyu/parle.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso Terima Pengaduan Anggota DPRD Papua Barat



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso Terima Pengaduan Anggota DPRD Papua Barat.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso Selasa (20/8) sore di ruang kerjanya Gedung Nusantara III menerima pengaduan beberapa anggota DPRD Papua Barat. Hal ini terkait dengan 44 anggota DPRD Papua Barat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD 2010-2011 sebesar Rp 22 miliar.

Dalam pernyataannya, Priyo berjanji akan membantu menyelesaikan permasalahan ini, dengan sebelumnya mempelajari poin-poin permasalahan.

Untuk itu, ia meminta kepada Anggota DPRD Papua Barat untuk menyiapkan poin-poin permasalahan, agar mudah mempelajarinya.

Sebelumnya, para Anggota DPRD ini mengadu bahwa penahanan 44 anggota DPRD sangat mengganggu stabilitas dan jalannya roda pemerintahan serta pembangunan di daerah itu. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Papua akan memanggil seluruh tersangka sebanyak 44 orang ini untuk diperiksa secara bertahap.

Berdasarkan data yang dihimpun Parlemen, pada Jumat (19/7) Kejaksaan Tinggi Papua menjemput paksa Ketua DPRD Papua Barat Yoseph Yohan Auri dan Direktur PT Papua Pomerai Mandiri (Padoma) Ahmad Suhadi. Keduanya dijemput paksa karena tidak memenuhi dua panggilan kejaksaan.

Yoseph dan Yohan langsung ditahan karena perkara penyalahgunaan wewenang dengan meminjamkan dana APBD ke PT Padoma sebesar Rp 22 miliar. Kasus itu diduga melibatkan 44 anggota DPRD Papua Barat, karena telah menerima pinjaman dengan kisaran Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.

Dari hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Papua, puluhan tersangka ini bertindak sangat kooperatif dan sudah mengembalikan dana yang dipinjam. Dari total dana APBD yang diduga korupsi sebesar Rp 22 miliar atau dipinjam oleh para tersangka, sebanyak 19 miliar sudah dikembalikan. Sementara sisanya Rp 3 Miliar, sudah dikembalikan namun penyidik belum mendapatkan bukti pengembaliannya, sehingga dianggap belum dikembalikan. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

DPR Bertekad Tuntaskan RUU Migas



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berpesan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR segera menuntaskan RUU Migas sebelum berakhir masa

tugas 2014 mendatang.

“RUU Migas merupakan rujukan bukan hanya untuk nasional tetapi juga internasional, dan menjadi RUU legacy,” ujarnya saat memimpin pergantian Pimpinan Komisi VII DPR, di Gedung Nusantara I, Selasa (20/8).

Menurut Priyo, dirinya menitipkan kepada Komisi VII DPR agar terus berjuang menuntaskan RUU Migas tersebut, meskipun ada kebijakan yang tidak populer namun yang utama untuk kepentingan bangsa dan negara. “Misalnya saja isu tentang pembubaran suatu lembaga, harus disikapi dengan bijaksana,” tambahnya.

Priyo mengapresiasi positif peran pengawasan Komisi VII DPR dalam menyuarakan isu energi bagi bangsa dan negara. “Banyak orang melihat ini tahun terakhir Dewan, namun harus kita buktikan bahwa DPR tetap dapat mengukir prestasi khususnya perancangan uu tdk boleh diabaikan, pengawasan juga tetap kita kedepankan,” katanya.

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan, RUU Migas dapat selesai pada akhir masa jabatan bila seluruh anggota Komisi VII DPR punya tekad yang besar. “Amanah ini akan (Komisi VII DPR) jalankan sebaik mungkin,” ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.



Ketua DPR Terima Audiensi Peserta Paskibraka Tahun 2013

Ketua DPR Marzuki Alie Selasa (20/8) sore di *Operation Room* menerima 66 peserta Paskibraka tahun 2013. Ia menilai, kunjungan audiensi para peserta Paskibraka ke lembaga negara sangat positif untuk generasi muda.

“Mereka melakukan kunjungan ke setiap lembaga negara, dan menurut saya ini sangat baik. Mereka mendapatkan informasi yang cukup mengenai lembaga negara tersebut. Mengapa ini perlu diberikan, agar hasil kunjungan ini bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat mereka di daerah,” ujar Marzuki usai menerima kunjungan audiensi di Gedung Nusantara.

Politisi Demokrat ini menambahkan, apa yang disaksikan para generasi muda di media masa, masih ditangkap secara salah, sehingga menimbulkan pesimisme terhadap masa depan bangsa. Namun dengan diberikan penjelasan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia, tambah Marzuki, akan tumbuh harapan, karena bangsa ini sedang berproses menuju negara yang lebih baik ke depannya.

“Harapannya, mereka yang akan menjadi calon-calon pemimpin di masa depan, akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan ini modal yang mereka miliki sebagai teladan, sampai mereka nanti mendapat posisi yang baik

di negara ini, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup untuk melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa,” tambah orang nomor 1 di DPR ini.

Selain itu, ia juga berharap para peserta Paskibraka ini dapat menjadi teladan yang bisa memotivasi teman-temannya. Oleh karena itu, ujar Marzuki, mereka harus terus mengigsi perjalanan mereka dengan ilmu pengetahuan di sekolah, dan tetap menjadi yang terbaik di daerahnya.

Salah satu peserta Paskibraka dari Sulawesi Tenggara, Adelana Tesalonika mengaku sangat bangga bisa menjadi salah satu peserta pengibar bendera di Istana Merdeka. Dari hasil kunjungan ke DPR ini, Dea –panggilan akrab Adelana- mendapatkan banyak pengetahuan tentang lembaga negara yang akan ia berikan kepada teman-teman di daerahnya.

“Jika nanti saya kembali ke daerah, saya bisa membagikan apa yang saya dapat di Jakarta kepada teman-teman di daerah. Selain itu, dapat memotivasi mereka agar dapat mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi,” ungkap Dea yang bertugas sebagai pembawa baki bendera ketika upacara Kemerdekaan HUT Republik Indonesia ini. (sf)/foto:odjje/parle/iw.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dan Pimpinan Komisi VII DPR usai pengukuhan kembali pimpinan Komisi VII, Rabu (21/8). Foto: Iwan Armanias/Parle.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima Delegasi Indonesian Interfaith Scholarship (IIS), Selasa (20/8). Foto: Wahyu/Parle.



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq didampingi anggota Komisi I saat menerima kunjungan Delegasi Kongres Amerika Serikat, Senin (19/8). Foto: Odjie/Parle.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dan Pimpinan Komisi II DPR usai pengukuhan kembali pimpinan Komisi II, Rabu (21/8). Foto: Wahyu/Parle.